

**ANALISIS RESEPSI MASYARAKAT SURAKARTA TERHADAP KONFLIK  
KERATON SURAKARTA MENGENAI PENGUKUHAN K.G.P.H  
PANEMBAHAN AGUNG TEDJOWULAN SEBAGAI MAHA MENTERI DI  
SURAT KABAR SOLOPOS EDISI 26-31 AGUSTUS 2013**

**NASKAH PUBLIKASI  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar S-1 Ilmu Komunikasi**



**Oleh :**

**Tiffany Renatasari  
L100100012**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102  
Telp. (0271) 717417 – Fax. (0271) 715448

Syarat Persetujuan artikel publikasi ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi tugas akhir:

Nama : M. Toharuddin, MA dan Budi Santoso, M.Si

Telah membaca, mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa:

Nama : Tiffany Renatasari

Nim : L100100012

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Analisis Resepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Konflik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Mengenai Pengukuhan K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan Sebagai Maha Menteri Di Surat Kabar Solopos Edisi 26 – 31 Agustus 2013

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan yang dibuat, sehingga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Pembimbing I

M. Toharuddin, MA

NIK. 848

Pembimbing II

Budi Santoso, M.Si

NIK. 1276

## ABSTRAK

**Tiffany Renatasari, L100100012, Analisis Resepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Konflik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Mengenai Pengukuhan K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan Sebagai Maha Menteri Di Surat Kabar Solopos Edisi 26 – 31 Agustus 2013, Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.**

Konflik dapat timbul dimana saja dalam masyarakat. Tidak memandang kelas sosial baik itu di masyarakat biasa, masyarakat menengah atas bahkan hingga di kalangan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta. Sejak hari pertama terjadinya konflik pengukuhan K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri Solopos sebagai surat kabar yang 17 tahun dan masih eksis hingga sekarang selalu menjadikan berita tersebut topik utama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemaknaan dari masyarakat Surakarta terhadap konflik di Keraton Kasunanan Surakarta mengenai Pengukuhan K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri dengan menggunakan metode analisis resepsi. Data didapatkan dengan cara dokumentasi dan wawancara mendalam dengan enam informan yang telah dikategorisasikan. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan berada di posisi *oppositional* yakni menolak dan tidak setuju dengan konflik yang terjadi di Keraton Surakarta. Para informan menolak makna dominan yang ditawarkan oleh media. Mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai konflik Keraton Surakarta atas konflik fisik, konflik kekerasan verbal dan konflik kepentingan yang ada di Solopos. Sedangkan beberapa informan berada pada posisi *dominant* dan *negotiated* mengenai beberapa hal mengenai konflik Keraton Surakarta.

Kata Kunci : analisis resepsi, konflik keraton surakarta, surat kabar solopos

## A. PENDAHULUAN

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah simbol Kota Surakarta yang juga sebagai salah satu tempat wisata. Keraton Kasunanan Surakarta selalu menjaga dan mempertahankan budaya dan tradisi yang telah ada dari jaman dulu hingga sekarang. Pertengahan tahun 2013, Keraton Kasunanan Surakarta mengalami konflik internal yang berujung pada kisruhnya Keraton. Konflik internal yang terjadi antara kubu Dwitunggal dan kubu Lembaga Dewan Adat tersebut juga membuat warga di lingkungan Keraton resah.

Konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta ini bermula saat akan diadakannya rencana pengukuhan K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri yang diteruskan dengan acara

halalbihalal. Kondisi Keraton sudah memanas bahkan satu hari sebelum acara tersebut dilaksanakan.

Satu hari sebelum acara dilaksanakan, beredar isu bahwa bila acara pengukuhan tersebut tetap dilaksanakan maka Dewan Adat akan membubarkan secara paksa. Puncaknya terjadi peristiwa pendobrakan pintu di Sasana Putra pada 26 Agustus 2013 pukul 19.45 WIB. Pendobrakan pintu yang dilakukan oleh warga Baluwarti diduga menggunakan mobil milik K.P.A.A. Condrokusumo Suro Agul-Agul.

Berkaitan dengan konflik yang dari hari ke hari semakin memanas, peneliti tertarik untuk mengetahui resepsi masyarakat Surakarta terhadap konflik Keraton Kasunanan Surakarta mengenai masalah pengukuhan K. G.

P. H. Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri di surat kabar Solopos dari mulai awal konflik yakni tanggal 26 hingga 31 Agustus 2013.

## B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana analisis resepsi masyarakat Surakarta terhadap konflik Keraton Kasunanan Surakarta mengenai pengukuhan K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri di surat kabar Solopos edisi 26 – 31 Agustus 2013?

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Konflik Sosial Edwar Azar

Menurut Edwar Azar analisa konflik sosial lebih memfokuskan perhatian pada kelompok identitas, apapun definisinya, dengan memperhatikan bahwa yang berada dalam inti masalah adalah hubungan antara kelompok identitas dan negara bahwa kepentingan dan keperluan

individual dijembatani melalui keanggotaan kelompok sosial (“yang menjadi perhatian yakni *kebutuhan sosial* individual termasuk keamanan, identitas, pengakuan dan yang lain”, 1986, 31) (Miall, ramsbotham, woodhouse, 2009: 113-114).

### 1. Encoding-Decoding

Setiap pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan pasti akan melalui proses *encoding* dan *decoding*. Menurut Dominick dalam Morrisian, decoding adalah kegiatan menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerimanya (Dominick dalam Morrisian, 2013:21).

Menurut Hall, khalayak melakukan dekoding terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi

yakni: a) posisi hegemoni dominan; b) negosiasi; dan c) oposisi (Stuart Hall dalam Morissan, 2013:550)

a. Posisi Hegemoni Dominan (*dominant hegemonic position*).

Hall menerangkan hegemoni dominan sebagai situasi di mana “*The media produce the message; the masses consume it. The audience reading coincide with the preferred reading*” (media menyampaikan pesan, khalayak menerimanya. Apa yang disampaikan media secara kebetulan disukai khalayak) (E.M., Griffin dalam Morissan, 2013:550).

b. Posisi Negosiasi (*Negotiated position*).

Posisi di mana khalayak secara umum menerima ideologi dominan tapi menolak penerimaannya dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, khalayak menerima ideologi dominan yang

sifatnya umum, namun mereka akan melakukan beberapa pengecualian dalam penerapannya disesuaikan dengan aturan budaya setempat (Morissan, 2013:550).

c. Posisi Oposisi (*oppositional position*).

Cara terakhir yang dilakukan khalayak dalam melakukan dekoding terhadap pesan media adalah melakukan “oposisi” yang terjadi ketika khalayak audiensi kritis mengganti atau mengubah pesan atau kode yang disampaikan oleh media dengan pesan atau kode alternatif (Morissan, 2013:551).

## 2. Reception Analysis

Menurut Jensen (1993) dalam Fatin, *Reception Analysis* adalah sebuah metode yang membandingkan antara analisis tekstual wacana dan media wacana khalayak yang hasil

interpretasinya merujuk pada konteks, seperti *cultural setting* dan konteks isi media lain (Jensen dalam Fatin, 2013:36).

Pemanfaatan teori *reception analysis* sebagai pendukung dalam kajian khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak pasif namun dilihat sebagai agen kultural (*cultural agent*) memiliki kuasa sendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media (Fiske dalam Adi, 2012:26-27).

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis resepsi. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya (Dwita, 2012:138).

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik wawancara. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kemudian peneliti menganalisis pemaknaan masyarakat terhadap konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta, apakah masuk dalam *Dominant-Hegemonic Position*, *Negotiated Position* atau *Oppositional Position*.

### 3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel masyarakat Surakarta dengan mengkategorikan

menjadi tiga golongan. Yakni kategori pendidikan terakhir (SMA dan S1), latar belakang etnik (Jawa dan non Jawa) serta pekerjaan (PNS dan Swasta). Sampel berjumlah enam orang.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

##### a. Menyeleksi

Peneliti menyeleksi informan yang akan diwawancarai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan yang paling kredibel untuk menjawab penelitian.

##### b. Menganalisis

Setelah melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisis hasil dari wawancara dan menentukan hasil wawancara apakah informan masuk dalam *Dominant-Hegemonic Position*,

*Negotiated Position* atau *Oppositional Position*.

### 3. HASIL PENELITIAN

#### 1. Encoding

Dalam pemberitaannya di Solopos edisi 26-31 Agustus 2013 mengenai konflik Keraton Surakarta, Solopos menampilkan konflik yang semakin harinya semakin memanas. Konflik-konflik yang ada dalam pemberitaan dalam Solopos kemudian dikategorisasikan berdasarkan pada konflik yang berkaitan dengan fisik, konflik yang mengandung kekerasan verbal dan konflik kepentingan.

Berdasarkan pada konflik yang mengandung unsur fisik dapat dilihat pada pemberitaan Solopos di edisi 27, 28 dan 29 Agustus 2013. Pada edisi Selasa 27 Agustus 2013 “2 Kubu Keraton Bentrok” di halaman *headline* kolom 2. Pemberitaan tersebut tentang



terjadinya bentrok dan baku pukul di kompleks Keraton Surakarta oleh para prajurit Keraton Surakarta yang mengawal K.R.M. H Satryo Hadinagoro kubu Lembaga Dewan Adat. Akhirnya terjadilah peristiwa saling pukul antara kedua kubu Lembaga Dewan Adat dan massakubu pembela Hangabehi dan Tedjowulan.

Kemudian untuk konflik yang masuk dalam kategorisasi konflik kekerasan verbal terdapat pada edisi 26, 27 dan 30 Agustus 2013. Pada pemberitaan edisi 26 Agustus dengan judul “Tedjowulan Jadi Maha Menteri, Keraton Memanas”. Dalam pemberitaan di edisi tersebut Mba Moeng dari kubu Lembaga Dewan Adat sempat memaki-maki beberapa orang sewaktu akan menuju ke Sasana Mulya.

Kemudian untuk kategorisasi mengenai konflik yang terakhir adalah konflik kepentingan. Dimana dalam konflik kepentingan ini dapat menyangkut segala hal seperti uang, peralatan, ruang dan wewenang. Dalam Solopos edisi 27 Agustus 2013 dengan judul “Dewan Adat Lengserkan Raja Solo” berisikan mengenai Lembaga Dewan Adat yang mengambil alih wewenang dan tugas raja.

## 2. Decoding

Pendapat informan I mengenai konflik di Keraton Surakarta seharusnya konflik tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat dimusyawarahkan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik yang dapat diterima oleh raja Keraton Surakarta. Menurut apa yang diberitakan di Solopos pihak

Hangabehi dan Tedjowulan merupakan kubu atau pihak yang benar.

Untuk informan II menurutnya konflik yang terjadi di Keraton Surakarta merupakan hal yang biasa terjadi disebuah kerajaan. Konflik mengenai perebutan kekuasaan seperti di Keraton Surakarta harus diselesaikan oleh keluarga keraton sendiri. Mengenai pembubaran acara pengukuhan menurut informan II sangat disayangkan. Karena menurutnya Tedjowulan mendapat gelar menjadi Maha Menteri tersebut sudah dengan persetujuan raja Hangabehi atau Paku Buwono sehingga acara pengukuhan tersebut Mba Moeng tidak berhak membubarkannya.

Pendapat informan III terdapat adanya perbedaan sudut pandang atau

kepentingan yang berbeda terhadap keberadaan Maha Menteri di Keraton Surakarta. Apakah itu mengenai kepentingan budaya atau politik. Informan berharap konflik keraton dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut agar citra keraton tetap terjaga sebagai salah satu cagar budaya.

Informan IV melihat konflik di Keraton Surakarta seharusnya ada penengah yang disegani oleh pihak keraton. Informan berpendapat adanya acara pengukuhan dimana ada pihak yang tidak mengetahui adanya acara tersebut dirasa cukup aneh menurut informan IV. Menurut Informan seharusnya acara tersebut diumumkan kepada semua pihak sehingga semua pihak tahu.

Pendapat informan V tentang konflik Keraton Surakarta, informan

merasa prihatin dengan konflik yang terjadi. Seharusnya konflik tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai menyebar luas ke masyarakat. Apalagi konflik sampai terjadi tindak anarkis yang dilakukan masing-masing kubu.

Informan VI memiliki pendapat, kepemimpinan raja dan Maha Menteri di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat harus dipertahankan. Hal itu perlu dilakukan untuk mempertahankan nilai budaya bukannya untuk ruang politik. Informan juga mengatakan bahwa seharusnya kedua belah kubu dapat menahan diri apalagi saat terjadinya konflik merupakan bulan Syawal dan menurutnya sangat tidak masuk akal jika sampai terjadi konflik di keraton.

#### 4. PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pemaknaan masyarakat terhadap konflik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengenai pengukuhan K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri di Surat Kabar Solopos 2013 dengan mengkategorikan informan menjadi tiga kategori yakni kategori pendidikan, pekerjaan dan etnik budaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hampir semua informan berada di posisi *oppositional* atau oposisi dalam banyak hal di pemberitaan konflik Keraton Surakarta. Para informan menolak dan tidak dapat menerima makna dominan yang ditawarkan Solopos mengenai konflik yang terjadi di Keraton

Surakarta. Beberapa informan juga ada yang berada di posisi *negotiated* dan *dominant* untuk beberapa hal dalam pemberitaan konflik Keraton Surakarta.

### 1. *Oppositional*

Penerimaan makna oleh informan berlatar belakang pendidikan (S1 dan SMA) mengenai konflik yang terjadi di Keraton Surakarta berkenaan dengan konflik yang mengandung kekerasan verbal dan konflik yang berkaitan dengan fisik memposisikan informan I dan II pada posisi *oppositional*. Informan tidak setuju dengan adanya konflik yang mengandung kekerasan verbal dan fisik yang ada dalam pemberitaan konflik Keraton Surakarta.

Informan III dan IV yang memiliki latar belakang pekerjaan (PNS dan Swasta) juga menolak konflik yang

mengandung kekerasan verbal, fisik dan kepentingan. Hal tersebut membuat informan III dan IV berada di posisi *oppositional*.

Informan III (Joko Purwanto) melihat konflik yang terjadi di keraton mengenai konflik kekerasan verbal yang dilakukan oleh Mba Moeng seharusnya tidak terjadi. Menurutnya Mba Moeng sudah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak etis dilakukan oleh seorang kerabat Keraton Surakarta.

Informan V dan VI juga berada di posisi *oppositional* untuk konflik yang berkaitan dengan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Adat. Informan V dan VI sangat menyayangkan tindakan Lembaga Dewan Adat yang sangat tidak patut dilakukan oleh kerabat Keraton Surakarta.

## 2. *Negotiated*

Hanya beberapa informan yang masuk dalam posisi *negotiated* saat melihat konflik yang terjadi di Keraton Surakarta. Untuk konflik kepentingan seperti pada edisi 27 Agustus 2013 dimana Dewan Adat mengambil alih tugas dan wewenang raja Paku Buwono XIII. Informan I, II dan V berada di posisi *negotiated*.

Informan I melihat pengambil alihan wewenang raja boleh saja dilakukan apabila memang raja sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Tetapi disisi lain pengambil alihan tersebut harus disetujui oleh Sinuhun sendiri dan harus dibicarakan kembali di antara kedua belah pihak.

Informan II dan V tidak jauh beda dengan informan I. Informan V (Irvan Ansyori) yang memiliki latar belakang etnik non Jawa berada di posisi

*negotiated* untuk pengambil alihan wewenang raja oleh Lembaga Dewan Adat. Menurutnya bisa saja Lembaga Dewan Adat mengambil alih wewenang raja tetapi disisi lain pengambil alihan tersebut harus melalui proses dan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.

## 3. *Dominant*

Ada beberapa informan yang berada di posisi *dominant* yakni dapat menerima pemberitaan mengenai konflik di Keraton Surakarta. Mengenai konflik fisik dimana warga Baluwarti melakukan pendobrakan pintu di Sasana Putra informan I, II, III dan V berada di posisi *dominant*.

Pendobrakan pintu yang terdapat di edisi 27 Agustus 2013 tersebut dilakukan oleh warga Baluwarti karena adanya rumor yang menyebut bahwa raja Hangabehi telah disandera.

Karena rumor tersebut salah seorang warga dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser mendobrak pintu Sasana Putra.

Informan I, II dan III memiliki pendapat yang sama mengenai pendobrakan pintu tersebut. Menurut para informan pendobrakan pintu tersebut wajar dilakukan karena keselamatan raja yang sedang terancam. Hal itu wajar dilakukan oleh warga karena merasa ingin menolong rajanya.

Informan V pun tidak jauh beda dengan informan I, II dan III. Informan V berpendapat kalau memang raja disandera dan jalan satu-satunya hanyalah mendobrak pintu maka wajar saja hal itu dilakukan. Jadi pendobrakan dilakukan untuk menyelamatkan raja yang sedang disandera merupakan hal yang wajar.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari pemaknaan yang telah dilakukan oleh para informan maka dapat disimpulkan bahwa para informan berada di posisi *oppositional* yakni menolak dan tidak setuju dengan pemberitaan konflik Keraton Surakarta. Para informan menolak makna dominan yang ditawarkan oleh media. Mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai konflik Keraton Surakarta atas konflik fisik, konflik kekerasan verbal dan konflik kepentingan yang ada di Solopos.

Beberapa informan ada pada posisi *negotiated* dan *dominant* untuk beberapa hal dalam memaknai konflik Keraton Surakarta. Informan yang berada di posisi *negotiated* dimana secara umum menerima ideologi dominan namun menolak

penerimaannya dalam kasus tertentu. Sedangkan untuk informan yang berada dalam posisi *dominant* seperti yang dijelaskan oleh Stuart Hall dimana pesan yang diterima oleh informan sesuai dan dapat diterima oleh informan.

## 2. Saran

Pada penelitian selanjutnya untuk analisis resepsi media surat kabar mengenai konflik Keraton Surakarta dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi lain seperti metodologi kuantitatif. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih mendalam dan terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

McQuail, Denis. 1989. *Teori Komunikasi Massa*. Bandung: Erlangga.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga*. Jakarta: Kencana.

Skripsi :

Fatin, Aisyah. 2013. *Analisis Resepsi Penonton Perempuan Yang Sudah Menikah Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Di Film Die Fremde (When We Leave)*. Skripsi pada Program Sarjana S1 Studi Program Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta: Dipublikasikan

Jurnal :

Adi, Tri Nugroho. 2012. *Mengkaji  
Khalayak Media Dengan  
Metode Penelitian Resepsi.*

Dalam jurnal Acta dium A Vol  
8 No. 1, 2012. Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Poltik.

Dwita, Desliana. 2012. *Resepsi  
Masyarakat Terhadap Siaran  
Televisi Asing (Analisis  
Resepsi Khalayak di Batam  
Tentang Isi Siaran Televisi  
Singapura dan Malaysia).*

Dalam jurnal Semai  
Komunikasi Vol. II, No. 2, Juni  
2012. Hal:136. Batam: Ilmu  
Komunikasi.